

ABSTRAK

Nur hasanah, Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (Studi Kasus Kec.Sokobanah Kab. Sampang) Dibawah bimbingan Gita Arasy Harwida,S.E.,M.Tax., QIA., CA

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (Studi Kasus Kec.Sokobanah Kab. Sampang) apakah sesuai dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Proses dari teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, serta studi dokumen.

Simpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan (Studi Kasus Kec.Sokobanah Kab. Sampang) di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

Kata kunci : pajak bumi dan bangunan pedesaan

ABSTRACT

Nurhasanah, implementation of Rural land and building tax collection (Case study Sokobanah districts, Sampang regency). Under the guidance of Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., AK., QIA., CA

The purpose of this study was to determine the implementation of Rural land and building tax collection (Case study Sokobanah districts, Sampang regency) whether in accordance with the regulations of Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 on local taxes and levies, and Local Regulations, and local regulations No. 4 of 2011 on local taxes

In this study using a qualitative approach to primary and secondary data sources. The process of data collection techniques used in this research is by observation, interview, and document study

Conclusion from this research is the implementation of Rural land and building tax collection (Case study Sokobanah districts, Sampang regency). in District Sokobanah Sampang are in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2009 on local taxes and levies, and Regional Regulation No. 4 of 2011

Keywords : rural property tax